

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan juga negara maju adalah kemiskinan. Larasati Prayoga (2021) mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya taraf hidup masyarakat, upah minimum yang tidak mencukupi dan pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya tanpa adanya tambahan lapangan kerja. Tujuan dari upah minimum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dengan demikian mengurangi kemiskinan (Todaro, 2014). Pertumbuhan ekonomi telah menjadi pendorong utama pengangguran dan faktor langsung dalam tingkat kemiskinan karena terbatasnya lapangan pekerjaan, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai perbaikan sosial dan ekonomi (O'Campo et al., 2015).

Hal ini juga disebabkan karena sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara maju. Kemiskinan membuat banyak orang sulit mendapatkan pendidikan yang baik dan pelayanan kesehatan yang baik, kurangnya kesempatan kerja menyebabkan banyak orang pindah ke perkotaan, dan sulitnya memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Di Indonesia, penyebab rendahnya indeks pembangunan manusia adalah kemiskinan yang berdampak pada seluruh aspek, terutama pendidikan. Kemiskinan dianggap sebagai konsekuensi langsung dari rendahnya kualitas pendidikan, karena pendidikan merupakan proses dimana siswa dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan mengubah masyarakat dan dirinya sendiri (Putra dan Suriaman, 2022).

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 3.888,6 ribu jiwa pada tahun 2023. Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di bagian timur provinsi ini memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 186,9 ribu jiwa (BPS, 2023). Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai kebijakan dan program untuk

mengentaskan kemiskinan. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat bagi keluarga yang teridentifikasi miskin atau rentan dan/atau orang yang terdaftar dalam Program Informasi Terpadu Perlakuan terhadap Masyarakat Miskin. Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial, serta mengurangi beban biaya akibat peningkatan kebutuhan keluarga penerima manfaat (KPM). Salah satu lembaga negara yang bergerak di bidang sosial adalah Dinas Sosial yang bertanggung jawab terhadap program ini. PKH merupakan program yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan mengurangi beban biaya. Selain itu, UU Jamsostek Nomor 40 Tahun 2014, UU Jamsostek Nomor 11 Tahun 2009, dan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pemajuan Penanggulangan Kemiskinan. UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.

Sejak tahun 2007 hingga tahun 2011, Program Keluarga Harapan diperluas ke 25 provinsi dan 118 kabupaten/kota, dengan tahun pertama dilaksanakan di 7 provinsi dan 48 kabupaten/kota. Terdapat banyak perubahan dalam pelaksanaan PKH, di tahun 2007 hanya siswa SD dan SMA saja yang menjadi penerima, tapi dengan seiring berjalannya waktu sekarang penerimaan tersebar merata. Tujuan dari program ini adalah memberikan bantuan keuangan bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM) sepanjang mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, karena dengan terpenuhinya kebutuhan, pendidikan dan kesehatan juga dapat berjalan dengan baik dengan terjamin yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH juga membantu lansia dan penyandang disabilitas untuk dapat mempertahankan status sosialnya.

PKH diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Tujuan PKH di bidang pendidikan

adalah untuk mengurangi jumlah pekerja di bawah umur di Indonesia dan meningkatkan kehadiran sekolah khususnya pada anak RTSM. Untuk mencapai tujuan ini, pendamping PKH mencoba mendorong RTSM untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah dan menyelesaikan setidaknya 85% hari sekolah efektif dalam enam tahun akademik (panduan umum PKH: 1-3). Meskipun terdapat beberapa solusi untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar dapat bersekolah dengan lebih baik, seperti dengan adanya beasiswa miskin dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun partisipasi siswa, khususnya anak-anak RTSM, di sekolah masih rendah. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai uang untuk bersekolah dan membayar perlengkapan sekolah. Banyak anak-anak berusia antara 7 dan 16 tahun yang putus sekolah karena mahal biaya pendidikan, mereka memilih mencari pekerjaan untuk bertahan hidup dan menghidupi keuangan keluarga mereka.

Pendamping PKH merupakan pelaksana program PKH di tingkat kabupaten yang direkrut dan dipekerjakan oleh negara dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Efektivitas PKH dipengaruhi oleh program RTSM (Seperti Program Pemberdayaan Masyarakat) yang dilaksanakan oleh penerima manfaat PKH dan peran mitra. Menurut Kementerian Sosial (2009:122) dalam Irawan, (2020), pendampingan adalah proses sosial antara pendamping sosial dengan klien yang tujuannya untuk memecahkan masalah, memberikan dukungan tambahan dan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan.

Program wajib belajar merupakan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perluasan akses pendidikan yang berkembang searah dengan kebutuhan bangsa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Belajar merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman sehingga terdapat perubahan tingkah laku pada dirinya. Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam kandungan) hingga liang lahat (Siregar, 2011 hlm. 3). Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan bagi warga masyarakat di Indonesia secara

berkualitas, mudah, murah, dan terjangkau demi terwujudnya rintisan sekolah gratis sehingga kepada dirinya dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan adanya Program Keluarga Harapan dan Pendamping PKH diharapkan dapat meningkatkan minat belajar sehingga Program wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Menurut Dinas Sosial, Kabupaten Tasikmalaya memiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 40.449 orang yang tersebar di 39 kecamatan pada tahun 2022. Berdasarkan Kecamatan Ciawi Dalam Angka (2022), Kecamatan Ciawi terdiri dari 11 desa dan berpenduduk 65.538 jiwa. Pada tahun 2021, Desa Pakemitan berpenduduk 6.108 jiwa dan 2.303 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Di bidang pendidikan, PKH memerlukan koordinasi dengan pihak terkait. Oleh karena itu, peran pendamping PKH sangat penting agar pelaksanaannya sampai pada kelompok sasaran yang tepat dan berjalan sesuai rencana. Di Desa Pakemitan, pelaksanaan PKH masih belum optimal, peneliti menemukan beberapa permasalahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan penggunaan bantuan secara umum yang dikhususkan untuk dana pendidikan dan fasilitas kesehatan serta adanya kekhawatiran masyarakat terhadap keakuratan informasi dan kelayakan untuk menjadi penerima PKH. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui peran pendamping PKH khususnya di Desa Pakemitan. Selanjutnya penulis memfokuskan pada proses yang dilakukan oleh para pendamping sebagai agen perubahan, yaitu membantu masyarakat dalam menjalankan program wajib belajar. Penelitian berjudul **"PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PROGRAM WAJIB BELAJAR DI DESA PAKEMITAN KECAMATAN CIAWI TASIKMALAYA"** adalah subjek yang menarik bagi penulis berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan dana bantuan dalam fasilitas pendidikan.

1.2.2 Masih adanya masalah dengan kevalidan data dan kelayakan penerima PKH.

1.3 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah yaitu: Bagaimana peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap program wajib belajar di Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah, adalah untuk mengetahui peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membantu dalam menerapkan program wajib belajar di Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi bahan bacaan, referensi penelitian, peningkatan pengetahuan, serta mampu mengembangkan keilmuan pendidikan masyarakat khususnya mengenai peran pendamping PKH dalam penerapan program wajib belajar di Desa Pakemitan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menguntungkan semua pihak, diantaranya:

a. Bagi Pendamping PKH

Temuan-temuan dari penelitian ini dapat dirujuk untuk memperkuat kemampuan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam meningkatkan minat belajar sehingga program wajib belajar terlaksana.

b. Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan mengenai peran pendamping PKH terhadap program wajib belajar.

c. Bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

Sebagai acuan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menjalankan program wajib belajar di keluarganya.

1.6 Definisi Operasional

Sebelum membahas tinjauan teoritis, penting untuk menjelaskan definisi operasional dari istilah-istilah untuk memperjelas, membantu, dan mencegah kesalahpahaman. Pada penelitian ini ada beberapa bahasan yang menjadi definisi operasional yaitu Peran Pendamping, Program Keluarga Harapan, dan Program wajib belajar.

1.6.1 Peran Pendamping

Konsep peran adalah inti dari diskusi teori peran. Karena peran juga berfungsi sebagai standar yang membatasi bagaimana seseorang harus berperilaku dalam suatu posisi. Peran adalah tugas atau kewajiban yang harus dilakukan seseorang untuk memenuhi suatu usaha atau pekerjaan, tanpa adanya peran akan menimbulkan kebingungan akan tugas dan fungsinya di masyarakat. Dengan memberikan dukungan dan inspirasi, seorang pendamping membantu masyarakat yang menjadi dampungannya dalam menjalankan kewajiban sosial mereka. Pendamping PKH Kecamatan diperlukan karena sebagian masyarakat miskin tidak memiliki kewenangan dan hak untuk berbicara. Di Kecamatan Ciawi terdapat Pendamping PKH yang memiliki peran dan bertugas mendampingi langsung Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam memverifikasi data, memberikan pembinaan, pemantauan penggunaan dana bantuan dan pelaporan dalam perkembangan kepada pihak kecamatan ataupun instansi terkait.

1.6.2 Program Keluarga Harapan

Salah satu program perlindungan sosial yang memberikan bantuan sosial di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi persyaratan tertentu. Program

pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) atau *Conditional Cash Transfers* (CCT) telah membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong kemandirian *Income Support Families* (ISFs).

1.6.3 Program Wajib Belajar

Program wajib belajar merupakan program dari pemerintah yang memberikan kesempatan baik untuk peningkatan kualitas diri, khususnya untuk masyarakat miskin, program ini merupakan program yang memang dicanangkan untuk mereka. Akan menjadi kerugian jika program tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal, dan program wajib belajar ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab pemerintah, program ini sudah seharusnya dimanfaatkan karena berbagai pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh, pengetahuan dan ketrampilan inilah yang menjadi bekal dalam melakukan perubahan pada hidup kita.